

## Panen Jagung untuk Dukung Ketahanan Pangan

**SEMARANG (KR)** - Kodim 0733 Kota Semarang berhasil panen jagung di lahan Medan Latihan Tempur Meteseh Tembalang yang sebagian dimanfaatkan sebagai lahan pangan tanaman jagung. Panen raya dilakukan Kamis (26/1) dihadiri Kasdam IV Diponegoro Brigjen TNI Dedy Supriyadi, Plt Walikota Semarang Hj Ir Hevearita G Rahayu MSos dan Muspida Kota Semarang.

Dandim 0733 Kota Semarang, Kolonel Inf Honi Havana MMDS dalam sambutan menyampaikan, pihaknya memanfaatkan lahan kosong untuk pengolahan jagung sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan. "Terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam pengolahan lahan jagung ini menjadi sebuah program ketahanan pangan yang bermanfaat," ungkapnya. Selanjutnya dalam kegiatan ini juga akan diluncurkan kegiatan program Asosiasi Pok Tani oleh Plt Walikota Semarang.

Plt Walikota Semarang Hj Ir Hevearita Gunaryanti MSos, menambahkan, panen raya ini juga merupakan suatu bentuk kolaborasi gagasan dari TNI dan Pemkot dalam program ketahanan pangan dalam upaya peningkatan inflasi ekonomi di bidang pertanian. "Kota Semarang merupakan kota metropolitan, tapi kami masih bisa menjaga ketahanan pangan dalam programnya untuk peningkatan kebutuhan pokok dalam peningkatan inflasi sesuai arahan bapak Presiden RI," jelasnya.

Sambutan Pangdam yang disampaikan Kasdam IV Diponegoro Brigjen TNI Dedy Suryadi, menerangkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dalam perkembangan kota semakin tahun semakin meningkat artinya bahwa kehidupan masyarakat meningkat sehingga membutuhkan ketahanan pangan yang sangat tinggi dengan luasnya lahan di Semarang dapat meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan pokok. (Cha)-d



KR-Chandra AN  
Dandim Semarang Kol Inf Honi Havana MMDS bangga menunjukkan hasil panen.

## FK dan FKG Unimus Kolaborasi Laksanakan IPE

**SEMARANG (KR)** - Tantangan perkembangan dan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat setiap tahunnya harus cepat mendapat respons. Guna mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi dari berbagai bidang kesehatan (interprofessional collaboration). Perubahan paradigma ini tidak dapat diwujudkan secara instan, perlu dilatih dalam proses pendidikan. Oleh karenanya, pendidikan berbasis Interprofessional Education (IPE) perlu diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan kesehatan.

Berangkat dari latar belakang tersebut, Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) berkolaborasi menggelar Pengabdian Kepada Masyarakat Interprofessional Education (IPE), Jumat (27/1/2023) di Balai Kelurahan Sendangmulyo. Acara dibuka Rektor Unimus Prof Dr Masrukhi MPd, dihadiri Lurah Sendangmulyo Nuridin SE, Dekan FKG Dr drg Risyandi Anwar SpKGA, Wakil Dekan I FKG drg Nur Khamilatussy S MM, Kaprodi S1 Kedokteran Gigi drg Rosyid Hanung Pinurbo, Direktur RSGM Unimus drg Dwi Windu Kinanti A MMR, Tim IPE FKG, Dekan FK dr Wahyu Budi Martono MSI Med SpTHT-KL, dan Wakil Dekan II FK dr Aisyah Lahdji MM MMR.

Selain pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, agenda Pengabdian Kepada Masyarakat Interprofessional Education (IPE) terdapat pula layanan dan pemeriksaan kesehatan umum (cek tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol dan lain-lainnya). Juga penyuluhan materi edukasi secara paralel, pameran poster serta pembagian doorprize yang menambah antusias warga untuk berkunjung di acara tersebut. (Sgi)-d

## Kapolres Wonogiri Luncurkan Program Kearifan Lokal

**WONOGIRI (KR)** - Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah SIK SH MM MIK meluncurkan program dengan kearifan lokal. Istilah program yang diluncurkan di depan awak media, Jumat (27/1) siang, terdengar sangat unik seperti *tiji tibe, bakso urat, super dan Gajah Mungkur*.

Bapak empat anak yang sebelumnya menjabat Kasat Patwal Dirlantas Polda Metro Jaya mengakui dirinya bersyukur saat mendapat tugas pimpinan Polri sebagai Kapolres Wonogiri. "Senang atau gembira karena serasa pulang ke rumah nenek," kata AKBP Indra saat menggelar silaturahmi dengan awak media Wonogiri dan Solo Raya di Sari Raras Waduk Gajahmungkur Wonogiri.

Pasalnya, istri Kapolres berasal dari Wonogiri dan mertuanya juga



KR-Humas Polres Wonogiri  
Kapolres Wonogiri menggelar silaturahmi dengan jajaran awak media Wonogiri

mantan Kapolres Wonogiri. Dengan didampingi Waka Polres, para Kabag dan Kasat di lingkungan Polres Wonogiri Kapolres baru Wonogiri minta kalangan wartawan sebagai mitra kerja

yang baik. "Jangan sungkan memberikan masukan dan ikut membantu mengontrol, mengawasi jajaran anggota kami di lapangan. Prinsip kami bekerja ini harus diniati sebagai ibadah," im-

## Sidang Perceraian ASN Didominasi Guru

**KARANGANYAR (KR)** - Badan Kepegawaian Pelatihan Dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karanganyar mencatat kalangan guru mendominasi sidang perceraian. Penyebab perpisahan mulai masalah ekonomi hingga perselingkuhan.

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karanganyar Suprpto mengungkapkan puluhan kasus perceraian ASN telah ditanganinya sejak 2020. Pada tahun 2020, 18 kasus. Lalu pada 2021 sebanyak 15 kasus dan tahun 2022 sebanyak 10 ka-

sus. Di Januari 2023, sebanyak dua kasus telah mendapat izin cerai dari Bupati Karanganyar Juliyatmono. "Trennya menurun untuk perceraian ASN. Tapi masih tetap ada. Biasanya, pemohon meminta cerai dengan alasan ekonomi. Namun juga ada yang karena perse-

lingkuhan," katanya, Jumat (27/1). Suprpto mengatakan kasus perceraian selama ini didominasi oleh guru. Ia mengungkapkan, adanya guru ASN perempuan yang menjadi simpanan orang lain. Padahal guru ASN tersebut masih bersuami. Akhirnya, ia ditalak suami sahnya saat ke-

tahuan selingkuh. Sesuai aturan, proses permohonan cerai ASN tidaklah mudah. ASN bersangkutan akan dimediasi oleh tim di BKPSDM. Mediasi tersebut digelar sebanyak tiga kali dengan jeda waktu satu bulan. Harapannya pasangan bisa memikirkan kembali terkait langkahnya untuk berpisah. Di beberapa kasus, pemohon membatalkan untuk proses perceraian. Namun ada pula yang ngotot untuk tetap bercera-

erai. "Jika mediasi gagal dan sudah mentok tetap akan bercerai, baru kami ajukan izin ke bupati," katanya. Selanjutnya Bupati akan memberikan surat izin untuk bercerai. Surat izin inilah yang menjadi dasar ASN mengajukan proses cerai di Pengadilan. Setelah ketok palu hakim, tunggangan istri yang melekat pada ASN akan dicoret secara otomatis. Hal ini berdampak pada gaji ASN tersebut. (Lim)-d

## Signifikan Kenaikan PAD Kota Magelang

**MAGELANG (KR)** - Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Magelang mengalami kenaikan yang signifikan, dari sebesar Rp 107.739.838.961, pada tahun 2013 lalu menjadi Rp 377.312.169.372, sampai akhir Desember 2022 lalu, atau mengalami kenaikan sekitar 350,21 persen.

Kenaikan PAD ini bukti keseriusan dalam mengelola dan menjaga kesinambungan fiskal (sustainable fiscal) di daerah untuk membiayai pembangunan di Kota Magelang. Bahkan telah dilaporkan, bahwa upaya optimalisasi pendapatan daerah khususnya PAD Kota Magelang menjadi rujukan, dan merupakan role model bagi daerah-daerah lain.

Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Walikota Magelang Drs HM Mansyur MAG,

Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH di forum penyerahan SPPT PBB-P2 Kota Magelang yang dilaksanakan di Pendopo Pengabdian Rumah Dinas Walikota Magelang, Jumat (27/1) lalu, di antaranya mengatakan hal ini tentu menjadi salah satu kebanggaan dan perlu terus ditingkatkan. Salah satu komponen dalam pencapaian realisasi PAD tersebut adalah dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dikatakan, sejak pengelolaan PBB-P2 menjadi kewenangan Pemerintah Kota Magelang pada tahun 2013 lalu, realisasi PBB-P2 menunjukkan progress yang signifikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan realisasi PBB-p yang semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan selama tahun 2022 capcandemi Covid-19 kesadaran ma-

syarakat wajib PBB-P2 Kota Magelang tidak berubah. Hal ini terlihat dari target PBB-P2 tahun 2022 sebesar Rp 6.500.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 6.884.410.236,- atau 105,91 persen dari target.

Pihaknya mengapresiasi atas prestasi dan kerja keras para stakeholder terkait, baik jajaran BPKAD, camat, lurah maupun partisipasi aktif para ketua RT, RW serta

dukungan masyarakat wajib pajak, sehingga target PBB-P2 tahun 2022 dapat terlampaui.

Jajaran BPKAD serta tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2 tahun 2023 Kota Magelang juga diminta agar SPPT PBB-P2 tahun 2023 segera didistribusikan kepada wajib pajak di wilayahnya masing-masing. "Tingkatkan kreativitas, inovasi, sinergitas dan kua-

litas pelayanan PBB-P2 dengan sistem online agar penerimaan dapat lebih optimal, serta tingkatkan integritas dalam pengelolannya demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas tata kelola PBB-P2 Kota Magelang," katanya.

Kepala BPKAD Kota Magelang Susilowati di antaranya mengatakan SPPT-P2 secara simbolis diberikan kepada camat, lurah dan wajib pajak kolektif. Maksud dan tujuannya untuk mempercepat proses penyerahan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar PBB-P2 tepat waktu. "Kegiatan ini juga sebagai sarana perwujudan keteladanan wajib pajak potensial di kalangan legislatif, eksekutif, pengusaha, tokoh masyarakat, serta ASN, agar memberikan contoh membayar PBB-P2 tepat waktu," kata Susi. (Tha)-d



KR-Thoha  
Wakil Walikota Magelang menyerahkan SPPT PBB-P2 Kota Magelang.

## Usulan BPIH 1444 H Sudah Menghitung Penurunan Paket Layanan Haji

**DIRJEN** Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief membenarkan bahwa Arab Saudi menurunkan paket layanan haji 1444 H sekitar 30% dari harga yang ditetapkan tahun 2022. Menurutnya, penurunan paket haji sudah diperhitungkan dalam usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M yang disusun pemerintah.

"Yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji. Adapun yang dimaksud dengan paket itu adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair. Untuk warga domestik, Pemerintah Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M," jelas Hilman Latief. Mengenai penurunan dimaksud, mulai SAR 10,596 - SAR 11,841 (sekitar Rp 43 juta - Rp 48 juta), mulai SAR 8,092 - SAR 8,458 (sekitar Rp 33 juta - Rp 34,5 juta), dan mulai SAR 13,150 (sekitar Rp 53,6 juta)

Arab Saudi menawarkan juga paket keempat, mulai SAR 3,984 (sekitar Rp 16 juta), namun tidak ada layanan di Mina (hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah). "Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket

layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga 30% dan itu sangat signifikan," tegas Hilman di Jakarta, Sabtu (21/1).

"Tahun lalu paket layanan haji (Masyair) 2022 sebesar SAR5.656,87. Alhamdulillah tahun ini selain turun, Kemenag berhasil negosiasi hingga menjadi SAR 4.632,87. Turun sekitar SAR 1.024 atau 30%," sambungnya. Jadi dalam usulan BPIH tahun ini, kata Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi. Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.

"Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas," jelasnya. Namun demikian, kata Hilman, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.

Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp 15.300 untuk kurs 1USD, dan Rp 4.080 untuk kurs 1 SAR. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan

adalah Rp 3.846. Untuk kurs USD tahun 2022 adalah Rp 14.425. Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur.

"Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini," tandasnya.

### Kenaikan Tarif BPIH

Kemenag mengusulkan BPIH tahun ini naik dibanding 2022. Kenaikannya sebesar Rp 514.888,02. Sebab, rata-rata BPIH yang diusulkan tahun ini adalah Rp 98.893.909,11. Sementara rata-rata BPIH 2022 sebesar Rp 98.379.021,09. Lantas, kenapa Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayar jemaah dalam usulan pemerintah justru naik. Hilman menjelaskan bahwa itu terjadi karena perubahan skema persentase komponen Bipih dan Nilai Manfaat. Pemerintah mengajukan skema yang lebih berkeadilan dengan komposisi 70% Bipih dan 30% nilai manfaat. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis.

Pemanfaatan dana nilai manfaat sejak 2010 sampai dengan 2022 terus mengalami peningkatan. Pada 2010, nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal yang diberikan ke je-

maah hanya Rp4,45 juta. Sementara Bipih yang harus dibayar jemaah sebesar Rp30,05 juta. Komposisi nilai manfaat hanya 13%, sementara Bipih 87%. Dalam perkembangan selanjutnya, komposisi nilai manfaat terus membesar menjadi 19% (2011 dan 2012), 25% (2013), 32% (2014), 39% (2015), 42% (2016), 44% (2017), 49% (2018 dan 2019). Karena Arab Saudi menaikkan layanan biaya Masyair secara signifikan jelang dimulainya operasional haji 2022 (jemaah sudah melakukan pelunasan), penggunaan dan nilai manfaat naik hingga 59%.

Nilai manfaat, bersumber dari hasil pengelolaan dana haji yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Karenanya, nilai manfaat adalah hak seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk lebih dari 5 juta yang masih menunggu antrean berangkat. Mulai sekarang dan seterusnya, nilai manfaat harus digunakan secara berkeadilan guna menjaga keberlanjutan. "Tentu kami juga mendorong BPKH untuk terus meningkatkan investasinya baik di dalam maupun luar negeri pasca pandemi Covid-19 ini, sehingga kesediaan nilai manfaat lebih tinggi lagi," tambahnya.

### Susun Peta Jalan Pola Pembiayaan Haji

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta BPKH untuk menyusun peta jalan (roadmap) pola pembiayaan haji dengan proporsi 70 (Bipih)

:30 (nilai manfaat). "Saya mengharapkan perlu ada roadmap yang lebih clear untuk membuat pola pembiayaan penyelenggaraan haji dengan proporsi 70:30. Usulan kami, paling cepat 8-10 tahun," kata Bukhori di Jakarta, Jumat (27/1). Legislator Dapil Jateng 1 ini mengaku keberatan jika calon jemaah tahun 2023 menanggung beban biaya yang terlalu tinggi. Sebaliknya, Bukhori meminta kenaikan dana haji dilakukan secara bertahap.

"Kami tidak setuju kenaikan biaya yang terlalu tinggi ini dibebankan pada calon haji tahun ini saja. Kenaikan semestinya dilakukan secara perlahan, dimulai dengan peningkatan setoran awal. Sementara di sisi lain, BPKH harus mampu meningkatkan nilai manfaat hasil dari pengelolaan dana dari 5,3 juta jemaah haji kita yang senilai Rp 167 triliun itu," terangnya.

Bukhori kembali menegaskan soal usulannya agar biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang dibebankan pada calon jemaah haji tahun ini cukup berada di angka Rp 50 juta. Selain lebih rasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji ke depan, Bukhori menilai angka tersebut lebih terjangkau bagi calon jemaah dan tidak terlalu memberatkan.

"Kami mengusulkan agar jemaah cukup dibebankan sebesar Rp50 juta, sementara sisanya akan di-cover melalui dana optimalisasi," jelasnya. (Rini Suryati) -d